



LAPORAN KINERJA

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

TRIWULAN II
TAHUN 2023



OT.04/LPP-1829/PW22/6/2023

27 JUNI 2023

Hadir Bermanfaat

RINGKASAN EKSEKUTIF

AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Optimalisasi
Penerimaan Daerah
yang Terealisasi

Target
(Juta Rupiah) **2.168**
Realisasi
(Juta Rupiah) **1.171,96**

Efisiensi Pengeluaran
Negara dan Daerah

Target
(Juta Rupiah) **136.270**
Realisasi
(Juta Rupiah) **54.807,14**

Penyelamatan
Keuangan Negara
dan Daerah

Target
(Juta Rupiah) **56.684**
Realisasi
(Juta Rupiah) **0**
Keterangan: Belum ada realisasi

AKUNTABILITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Hambatan
Pelaksanaan
Pembangunan

Target **85%**
Realisasi **0%**
Terselesaikan Terseselesaikan
Keterangan: Belum ada realisasi

Kegiatan
Prioritas Daerah
yang Diawasi

Target
2 KP
Realisasi
1 KP

Rekomendasi
Strategis yang di
Tindaklanjuti

Target **80%**
Realisasi **0%**
Tertindaklanjuti Tertindaklanjuti
Keterangan: Belum ada realisasi

AKUNTABILITAS BADAN USAHA

BUMD dengan Pengelolaan
Korporasi Baik

Target **1**
Realisasi **0**
Keterangan: Belum ada realisasi

BUMD&BLUD
SEHAT

Target **10**
Realisasi **10**

BUMDES
Mampu
Menyusun
Laporan
Keuangan

Target **59**
Realisasi **0**
Keterangan: Belum ada realisasi

BUMDES
Berkontribusi ke
Desa

Target **20**
Realisasi **0**
Keterangan: Belum ada realisasi

EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI

Pengawasan Represif
yang Dimanfaatkan

Target **100%**
Realisasi **0%**
Keterangan: Belum ada realisasi

Pengawasan Preventif
dan Edukatif yang
Dimanfaatkan

Target **85%**
Realisasi **0%**
Keterangan: Belum ada realisasi

Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik

Target **3 PEMDA** : Target **2 BUMDes**
Realisasi **0 PEMDA** : Realisasi **0 BUMDes**

Keterangan: Belum ada realisasi

KUANTITAS PENGENDALIAN INTERN

Kapabilitas APIP &
SPI Level 3

Target **9 PEMDA** Realisasi **8 PEMDA**
1 BUMD **0 BUMD**
3 BLUD **0 BLUD**
Keterangan: BUMD dan BULD Belum ada realisasi

MRI Level 3

Target **5 PEMDA** Realisasi **4 PEMDA**
2 BUMD **0 BUMD**
10 BLUD **0 BLUD**
Keterangan: BUMD dan BULD Belum ada realisasi

SPIP Level 3

Target **10 PEMDA** Realisasi **10 PEMDA**

Pengelolaan Aset
Memadai

Target **25 Desa** Realisasi **35 Desa**

Akuntabilitas
Keuangan, dan Kinerja

Target **10 PEMDA** Realisasi **3 PEMDA**
25 Desa **636 Desa**

TATA KELOLA UNIT PERWAKILAN

ZI

Target **Skor 75**
Realisasi **Skor 0**
Keterangan: Belum ada realisasi

SAKIP

Target **Skor 82**
Realisasi **Skor 0**
Keterangan: Belum ada realisasi

Efektivitas
Pengendalian
SPIP

Target **70%**
Realisasi **0%**
Keterangan: Belum ada realisasi

MRI

Target **100%**
Realisasi **72,73%**

Kepuasan
Layanan

Target **Skor 75**
Realisasi **Skor 0**
Keterangan: Belum ada realisasi

IKPA

Target **Skor 95**
Realisasi **Skor 94,31**

Pengelola
an BMN

Target **Skor 80**
Realisasi **Skor 0**
Keterangan: Belum ada realisasi

Kata Pengantar

Perwakilan BPKP Provinsi Bali menyusun Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas dalam menjalankan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan nasional/daerah. Pertanggungjawaban kinerja ini menyajikan prioritas dan capaian-capaian kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Bali berkontribusi positif bagi keuangan negara/daerah senilai Rp55,979 milyar atau 28,68% dari target tahun 2023 sebesar Rp195,122 milyar. Perwakilan juga melaksanakan pengawasan terhadap Program pembangunan prioritas nasional dan daerah pada triwulan ini, seperti pengawasan atas reformasi sistem kesehatan, sarana dan prasarana pendidikan; stunting; Proyek Strategis Nasional; P3DN; akuntabilitas pengelolaan anggaran pemilu dan pilkada; akuntabilitas keuangan pemerintah pusat, daerah dan desa; serta akuntabilitas keuangan BUMN dan BUMD. Disamping itu, perwakilan mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah, manajemen risiko, penguatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan SPI badan usaha, serta penguatan pengendalian risiko fraud pada Pemerintah Daerah/Badan Usaha.

Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali merupakan bagian dari kinerja BPKP sehingga diharapkan dengan tercapainya target-target kinerja akan mendukung tercapainya visi BPKP bagi Pemerintah yakni "Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kepercayaan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Bali, sehingga dapat melaksanakan pengawasan dengan baik. Kami berharap laporan kinerja ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, maupun masyarakat pada umumnya.

Kepala Perwakilan

Ditandatangani secara elektronik oleh

Muhammad Masykur

Bab 1

Kesimpulan, Permasalahan dan Rencana Tindak

A. Kesimpulan

Capaian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali atas 7 Sasaran Kegiatan (Saskeg) yang diukur dengan 17 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Secara umum, capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah 126,30%, yang merupakan rerata atas capaian lima sasaran kegiatan, yaitu Saskeg 1, 2, 4, 6, dan 7. Dua sasaran kegiatan yaitu saskeg 4 dan 6 mencapai rerata kinerja di atas 100,00% sedangkan saskeg 1, 2, 7 mencapai rerata antara 31,43% s.d. 86,00%;
2. Hasil pengukuran 17 IKK menunjukkan bahwa 8 IKK telah mencapai kinerja 100% atau lebih sedangkan 9 IKK lainnya memiliki capaian kinerja yang bervariasi, yaitu antara 0% sampai dengan 99,27%;
3. Rerata capaian tertinggi diperoleh Saskeg 6 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU sebesar 364,06% disusul dengan Saskeg 4 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha sebesar 100%;
4. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah berkontribusi pada peningkatan ruang fiskal sebesar Rp55,979 milyar atau 28,68% dari target tahun 2023 sebesar Rp195,122 milyar.

B. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, pencapaian target mengalami kendala, antara lain:

1. Belum terealisasinya rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti karena pengawasan masih berjalan atau baru selesai dan menunggu tindak lanjut dari mitra kerja. Pengukuran IKK ini dilaksanakan pada triwulan IV.
2. Belum terealisasinya indikator kinerja kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi karena rangkaian kegiatan pengawasan sedang berjalan dan pengukuran IEPK menunggu hasil penilaian SPIP terintegrasi.
3. Belum terealisasinya nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah karena kegiatan yang mendukung IKK tersebut dalam pelaksanaan penugasan.

C. Rencana Tindak Triwulan Berikutnya

1. Mengoptimalkan sinergi dan kolaborasi antar bidang pengawasan untuk kegiatan yang berkaitan dan mengatur strategi pemenuhan SDM sesuai prioritas batas waktu yang ditetapkan rental;
2. Melaksanakan metode pengawasan yang lebih komprehensif (audit/reviu/evaluasi) agar dapat memberikan rekomendasi strategis yang bermanfaat untuk K/L mitra
3. Menindaklanjuti hasil bimtek penilaian zona integritas dari Inspektorat BPKP;
4. Merealisasikan rencana aksi/tindak untuk pencapaian kinerja pada masing-masing IKK; dan
5. Aktif melakukan koordinasi dengan rental dan mitra kerja sehingga rencana pengawasan dapat dilaksanakan tepat waktu.

Bab 2

Uraian Kinerja

A. Capaian *Outcome* Triwulan II Tahun 2023

Secara umum, capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah 126,30%, yang merupakan rerata atas capaian lima Sasaran Kegiatan (Saskeg). Capaian kinerja tersebut didukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp13.286.229.483,00 atau 53,44% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp24.862.622.000,00.

Uraian rerata capaian kinerja masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Rerata capaian kinerja sasaran kegiatan 1 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah adalah sebesar 31,43%;
2. Rerata capaian kinerja sasaran kegiatan 2 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional adalah sebesar 50,00%;
3. Rerata capaian kinerja sasaran kegiatan 3 Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan pada K/L/D/BU yang Menjadi Tanggung Jawab Perwakilan BPKP sebesar 0%;
4. Rerata capaian kinerja sasaran kegiatan 4 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha adalah sebesar 100,00%;
5. Rerata capaian kinerja sasaran kegiatan 5 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi (EPK) adalah sebesar 0%;
6. Rerata capaian kinerja sasaran kegiatan 6 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU adalah sebesar 364,06%.
7. Rerata capaian kinerja sasaran kegiatan 7 Meningkatnya Meningkatkan Tata Kelola Unit Perwakilan adalah sebesar 86,00%.

Capaian ketujuh sasaran kegiatan di atas diukur dengan 17 indikator kinerja kegiatan (IKK). Delapan belas IKK akan diukur pada Triwulan IV Tahun 2023. Berdasarkan hasil pengukuran atas 17 IKK, 8 IKK telah mencapai kinerja 100% atau lebih sedangkan 9 IKK lainnya memiliki capaian kinerja yang bervariasi, yaitu antara 0% sampai dengan 99,27%. Rincian capaian masing-masing sasaran kegiatan dan IKK disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Capaian *Outcome* Triwulan II Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Target		Realisasi	Capaian (%)	
			2023	Trw II	Trw II	2023	s.d. Trw II
I	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah						
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (juta)	2.168	1.200	1.171,96	54,06	97,66
1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (juta)	136.270	60.000	54.807,14	40,22	91,35
1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (juta)	56.684	10.000	-	-	0,00
	Rerata Capaian Saskeg 1					31,43	

No.	Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Target		Realisasi	Capaian (%)	
			2023	Trw II	Trw II	2023	s.d. Trw II
II	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional						
2.1	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	85	-	-	-	NA
2.2	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2	1	1	50,00	100,00
	Rerata Capaian Saskeg 2					50,00	
III	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP						
3.1	Persentase rekomendasi strategis yang ditindak lanjuti	(%) Persen	80	-	-	-	NA
	Rerata Capaian Saskeg 3					-	
IV	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha						
4.1	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	1	-	-	-	NA
4.2	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	9	9	9	100,00	100,00
4.3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1	1	1	100,00	100,00
4.4	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	59	-	-	-	NA
4.5	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	20	-	-	-	NA
	Rerata Capaian Saskeg 4					100,00	
V	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi						
5.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	(%) Persen	100	-	-	-	NA
5.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	(%) Persen	85	-	-	-	NA
5.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	3	-	-	-	NA
5.4	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Badan Usaha	2	-	-	-	NA
	Rerata Capaian Saskeg 5					-	
VI	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU						
6.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Provinsi	1	1	1	100,00	100,00
6.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Kabupaten/ Kota	8	7	7	87,50	100,00
6.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP >= Level 3	Provinsi	1	1	1	100,00	100,00
6.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP >= Level 3	Kabupaten/ Kota	9	9	9	100,00	100,00
6.5	Jumlah Provinsi dengan MRI >= Level 3	Provinsi	1	1	1	100,00	100,00
6.6	Jumlah Kab/Kota dengan MRI >= Level 3	Kabupaten/ Kota	4	3	3	75,00	100,00
6.7	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	10	3	3	30,00	100,00

No.	Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Target		Realisasi	Capaian (%)	
			2023	Trw II	Trw II	2023	s.d. Trw II
6.8	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25	25	636	2.544,00	2.544,00
6.9	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25	25	35	140,00	140,00
6.10	Jumlah BUMD dengan MRI >= Level 3	BUMD	2	-	-	-	NA
6.11	Jumlah BLU/D dengan MRI >= Level 3	BLU/D	10	-	-	-	NA
6.12	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI >= Level 3	BUMD	1	-	-	-	NA
6.13	Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI >= Level 3	BLU/D	3	-	-	-	NA
	Rerata Capaian Saskeg 6					364,06	
VII	Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan						
7.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75	-	-	-	NA
7.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82	-	-	-	NA
7.3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	(%) Persen	70	-	-	-	NA
7.4	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	(%) Persen	100	72,73	72,73	72,73	100,00
7.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75	-	-	-	NA
7.6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95	95	94,31	99,27	99,27
7.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80	-	-	-	NA
	Rerata Capaian Saskeg 7					86,00	
	Rerata Capaian Kinerja Triwulan II					126,30	

Tabel 1 disajikan kembali pada Lampiran 1.

Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana pada tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut.

1 Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah” ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja, yaitu

1. Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi;
2. Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah; dan
3. Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, terdapat tiga IKK yang telah ditetapkan target kerjanya, sebagaimana uraian berikut:

1.1. Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi

IKK “Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi” menggambarkan sejauh mana nilai realisasi penerimaan negara/daerah yang dapat dioptimalisasi melalui kegiatan pengawasan BPKP.

Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi diukur dari jumlah kurang bayar atas penerimaan negara/daerah yang sudah disetor/ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk PNBPD berdasarkan bukti setor
- b. Untuk Pajak/BC berdasarkan surat ketetapan
- c. Untuk PAD berdasarkan Surat Ketetapan

Pada triwulan II tahun 2023, nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi sebesar Rp1.171.961.522,81 atau tercapai 54,09% dari target sebesar Rp2.168.000.000,00. Nilai tersebut merupakan hasil optimalisasi pengawasan OPAD pada Pemerintah Kabupaten Bangli dan Kabupaten Gianyar dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Penerimaan	Potensi OPAD (Rp)
1	Pajak Hotel	284.504.563,00
2	Pajak Restoran	265.789.949,00
3	Pajak Air Tanah	614.369.339,00
4	Pajak Hiburan	7.236.574,00
5	Pajak Penerangan Jalan	61.097,81
	Total	1.171.961.522,81

Selain, menerima konsultasi dari beberapa pemerintah daerah di Provinsi Bali terkait teknis dan pengawasan pendapatan daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Bali memiliki Kantor Pengelola Diklat yang merupakan kepanjangan dari Pusdiklatwas BPKP Ciawi juga memfasilitasi permintaan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bali maupun di luar Provinsi Bali dalam meningkatkan kompetensi APIP masing-masing pemerintah daerah, melaksanakan Audit atas Pendapatan Daerah.

Rencana tindak untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain dengan:

1. Melakukan asistensi teknik pengelolaan pajak daerah bagi tim pengelola pajak di kabupaten.
2. Melakukan sosialis/bimbingan teknis perpajakan dan retribusi daerah dalam rangka membangun kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

1.2. Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah

IKK “Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah” menunjukkan besarnya pengurangan/pengalihan nilai pengeluaran yang direncanakan (belum direalisasi) tidak tepat berdasarkan kegiatan pengawasan BPKP. Menilai efisiensi dan kesesuaian belanja dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan dan kriteria yang berlaku yakni:

- a. Nilai anggaran/rencana belanja yang berpotensi menjadi lebih efektif dan efisien dikarenakan:
 1. dialihkan ke proyek/kegiatan/program yang lebih berdampak atau lebih hemat
 2. rincian atau metodologi kegiatan diperbaiki sehingga lebih berdampak atau lebih hemat
 3. ukuran/indikator keberhasilan diperbaiki sehingga lebih terukur dan berorientasi hasil

- b. Nilai rupiah yang dapat dihemat melalui hasil pengawasan BPKP yang bersifat non-investigatif seperti audit klaim/verifikasi tagihan, koreksi *cost-recovery*, audit penyesuaian harga, audit *cost-saving*, dan sebagainya.

Realisasi IKK “Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah” triwulan II tahun 2023 sebesar Rp54.807.137.382,00 atau tercapai 40,22% dari target Rp136.270.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Topik APP	Nilai Efisiensi (Rp)
1	Akuntabilitas Pengamanan dan Pengawasan Pemilu	16.452.342.540,00
2	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	38.354.794.842,00
Total		54.807.137.382,00

Pengawasan yang mendukung pencapaian kinerja ini antara lain:

- Evaluasi akuntabilitas pengamanan dan pengawasan Pemilu pada KPU dan Bawaslu pada Provinsi Bali, Kabupaten Badung, dan Kota Denpasar;
- Evaluasi perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Badung, dan Pemerintah Kabupaten Jembrana

Rencana tindak untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain dengan:

- Mendorong dan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah khususnya inspektorat daerah untuk lebih intensif mengawal perencanaan dan penganggaran melalui optimalisasi pelaksanaan reviu dan pemetaan risiko tingkat strategis maupun operasional.
- Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis SPIP dan Manajemen Risiko bagi Instansi Vertikal untuk mengawal perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan APBN.
- Bersinergi dengan inspektorat daerah untuk meningkatkan tindak lanjut atas hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Bali.

1.3. Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah

IKK “Nilai penyelamatan keuangan Negara” menunjukkan besarnya jumlah temuan pengembalian ke kas negara atas belanja yang sudah direalisasikan dan/atau pemulihan hak negara atas aset negara.

IKK ini diukur dengan nilai belanja yang dikembalikan ke kas negara termasuk denda yang dikenakan dari hasil pengawasan BPKP dan nilai aset yang dipulihkan, misalnya melalui kegiatan audit investigatif, audit PKKN, dan audit lainnya.

Belum terdapat realisasi IKK “Nilai penyelamatan keuangan Negara” pada triwulan II tahun 2023 atau tercapai 0% dari target Rp56.684.000.000,00. Kegiatan pengawasan yang mendukung realisasi IKK ini masih dalam pelaksanaan kegiatan.

Rencana tindak untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain dengan:

- Meningkatkan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) secara intensif agar kasus yang sedang ditangani dapat dikonsultasikan terlebih dahulu, guna meyakinkan layak/tidaknya kasus tersebut ditindaklanjuti dengan audit PKKN atau audit investigasi;
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait agar pemenuhan data dukung dapat dilaksanakan secara optimal guna mendukung penugasan;
- Memantau pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pengawasan BPKP terkait dengan adanya koreksi/penyelamatan keuangan negara;

4. Menguatkan peran Inspektorat daerah untuk melakukan kegiatan investigasi;
5. Melakukan kolaborasi dan sinergi dengan APH dan Inspektorat daerah.

2

Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional” ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan; dan
2. Jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, terdapat satu IKK yang telah ditetapkan target kerjanya, yaitu:

Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi.

IKK “Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi” menunjukkan jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang ditargetkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) tahun tertentu yang diawasi dengan kegiatan pengawasan BPKP. Pengawasan dimaksudkan untuk menilai sejauh mana keberhasilan kegiatan prioritas nasional daerah mencapai target yang ditetapkan. Indikator ini diukur dengan menjumlahkan kegiatan prioritas daerah yang diawasi dengan kegiatan pengawasan perwakilan pada tahun berjalan.

Realisasi IKK “Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi” sampai dengan Triwulan II tahun 2023 adalah sebanyak satu kegiatan prioritas daerah atau mencapai 50% dari target sebanyak dua kegiatan prioritas daerah yang diawasi tahun 2023. Kegiatan yang diawasi adalah Program Transformasi Ekonomi Bali melalui Pengembangan Kawasan Wisata Ulan.

Program Transformasi Ekonomi Bali melalui Pengembangan Kawasan Wisata Ulan sebagai dukungan pemerintah pusat dalam upaya pemulihan ekonomi Kabupaten Gianyar dilaksanakan dengan penanganan isu kemacetan, perparkiran, pengendalian tata ruang dan pengurangan kesenjangan ekonomi di wilayah Ubud, Tegallalang dan Payangan. Program pengembangan dengan melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Desa Adat serta masyarakat telah direncanakan sebanyak 59 kegiatan. Sampai dengan Bulan Mei 2023, progres realisasi kegiatan pengembangan mencapai 16,07% terdiri atas realisasi sumber dana APBD sebesar 10,75%, APBN melalui ISWMP (*Improvement of Solid Waste Management to Support Regional Area and Metropolitan Cities Program*) sebesar 5,36%, sedangkan sebesar 83,93% belum jelas sumber pembiayaan dan pelaksanaannya. Rendahnya realisasi kegiatan tersebut berakibat adanya potensi ketidakberlanjutannya rencana program. Potensi ketidakberlanjutan program dapat mengakibatkan tujuan program tidak tercapai.

3

Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi Tanggung Jawab Perwakilan BPKP

Pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi Tanggung Jawab Perwakilan BPKP” ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja “Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti”.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, tidak terdapat target atas IKK ini maupun realisasi kinerjanya.

4

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha” ditunjukkan oleh pencapaian lima indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik;
2. Jumlah BUMD dengan kinerja sehat;
3. Jumlah BLUD dengan kinerja sehat;
4. Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan; dan
5. Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, terdapat dua IKK yang telah ditetapkan target kinerjanya, sebagaimana uraian berikut:

4.1. Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat

IKK “Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat” menunjukkan jumlah BUMD dengan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPKP ataupun asesor lainnya berdasarkan kriteria penilaian mencapai kategori “Sehat”. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan untuk mendukung IKK ini antara lain melakukan audit/evaluasi kinerja pada BUMD dan memantau tindak lanjut atas rekomendasi AOI yang diberikan. IKK ini diukur dengan jumlah BUMD dengan kinerja minimal “Sehat” pada tahun berjalan.

Realisasi IKK “Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat” sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebanyak 9 BUMD atau 100,00% dari target 9 BUMD. Realisasi tersebut diperoleh dari hasil penilaian kinerja Tahun Buku 2023 atas 9 BUMD di wilayah Provinsi Bali, yang seluruhnya memperoleh predikat “Sehat” atau nilai kriteria tingkat kesehatan di atas 2,9. Sembilan BUMD tersebut adalah:

1. Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung;
2. Perumda Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli;
3. Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng;
4. Perumda Air Minum Tirta Amerta Jati Kabupaten Jembrana;
5. Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar;
6. Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem;
7. Perumda Air Minum Panca Mahottama Kabupaten Klungkung;
8. Perumda Air Minum Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan; dan
9. Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar.

Sampai dengan triwulan II Tahun 2023, perwakilan telah melaksanakan evaluasi kinerja pada 13 BUMD, dengan hasil sembilan BUMD memperoleh predikat sehat dan empat BUMD memperoleh predikat kurang sehat.

4.2. Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat

IKK “Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat” menunjukkan banyaknya BLUD dengan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPKP ataupun *assessor* lainnya berdasarkan kriteria

penilaian mencapai kategori "Sehat". Kegiatan pengawasan untuk mendukung IKK ini yakni melakukan audit kinerja pada BLUD dan memantau tindak lanjut atas rekomendasi AOI yang diberikan. IKK ini diukur dengan jumlah BLUD dengan kinerja minimal "Sehat" pada tahun berjalan.

Sampai dengan triwulan II tahun 2023, realisasi IKK "Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat" sebanyak satu BLU/D dengan kinerja sehat atau 100% dari target satu BLUD. Realisasi tersebut merupakan hasil evaluasi atas kinerja pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wangaya Kota Denpasar Tahun 2022 dengan kinerja baik/sehat.

5

Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi" ditunjukkan oleh pencapaian empat indikator kinerja yaitu:

1. Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti;
2. Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti;
3. Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik; dan
4. Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, tidak terdapat target atas keempat IKK tersebut maupun realisasi kerjanya.

6

Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU" ditunjukkan oleh pencapaian 13 indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3
2. Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3
3. Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3
4. Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3
5. Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3
6. Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3
7. Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah
8. Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel
9. Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai
10. Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3
11. Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3
12. Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3
13. Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, dari 13 IKK terdapat delapan IKK yang telah ditetapkan target kerjanya, yang diuraikan sebagai berikut:

6.1. Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Tingkat kapabilitas APIP disimpulkan dari hasil penilaian tingkat kapabilitas yang dilaksanakan sendiri/penilaian mandiri oleh APIP K/L/Pemda menggunakan pedoman penilaian kapabilitas APIP, yang selanjutnya dievaluasi oleh BPKP.

IKK “Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” mencerminkan bahwa hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi K/L/D.

Inspektorat Provinsi Bali telah berada pada level 3. Dengan demikian, realisasi IKK “Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” pada triwulan II tahun 2023 sebanyak satu APIP atau tercapai 100% dari target sebesar satu APIP.

6.2. Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Kapabilitas APIP \geq Level 3, IKK “Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” juga mencerminkan bahwa hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi K/L/D.

Sampai dengan triwulan II tahun 2023, realisasi IKK “Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” di Provinsi Bali sebanyak 7 APIP atau tercapai 87,50% dari target sebesar 8 APIP. APIP pemerintah kabupaten/kota yang sudah mencapai Kapabilitas APIP level 3 sebagai berikut:

Level Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota			
No.	Nama APIP	Level	Status
APIP yang berada pada level 3:			
1	Inspektorat Kabupaten Badung	3	Telah terbit SP Deputi
2	Inspektorat Kabupaten Tabanan	3	
3	Inspektorat Kabupaten Klungkung	3	
4	Inspektorat Kota Denpasar	3	
5	Inspektorat Kabupaten Gianyar	3	
6	Inspektorat Kabupaten Bangli	3	
7	Inspektorat Kabupaten Buleleng	3	
APIP yang berada pada 2+:			
1	Inspektorat Kabupaten Jembrana	2+	Telah terbit SP Deputi
2	Inspektorat Kabupaten Karangasem	2+	

Rencana tindak untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain dengan:

- Melaksanakan bimtek/sosialisasi audit kinerja pada seluruh APIP di Provinsi Bali
- Melakukan pemantauan tindak lanjut rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Buleleng dan Inspektorat Kabupaten Bangli
- Melaksanakan pendampingan penilaian mandiri dan evaluasi atas hasil penilaian mandiri pada APIP yang belum mencapai level 3
- Meningkatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan APIP dalam mengembangkan kompetensi dan peningkatan kualitas hasil pengawasan.

6.3. Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

Maturitas SPIP K/L/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Level 3 merupakan tingkat minimal maturitas SPIP yang diharapkan dicapai oleh K/L/Pemda. Tingkat maturitas SPIP merupakan kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan serta dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dan panduan generik peningkatan efektivitas SPIP. Semakin tinggi level maturitas penyelenggaraan SPIP pada K/L/Pemda, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah.

IKK “Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” mencerminkan jumlah Provinsi dengan tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. IKK ini diukur dengan jumlah provinsi pada wilayah kerja pengawasan dengan level maturitas penyelenggaraan SPIP \geq Level 3.

Pemerintah Provinsi Bali memiliki maturitas SPIP pada level 3. Dengan demikian, realisasi IKK “Jumlah provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah sebanyak 1 Pemda atau tercapai 100% dari target 1 Pemda.

6.4. Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

IKK “Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” mencerminkan jumlah Kabupaten/Kota dengan tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. IKK ini diukur dengan jumlah kabupaten/kota pada wilayah kerja pengawasan dengan level maturitas penyelenggaraan SPIP \geq Level 3.

Maturitas SPIP seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali telah berada pada level 3. Dengan demikian realisasi IKK “Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” pada triwulan II tahun 2023 adalah sebanyak 9 kabupaten/kota atau tercapai 100% dari target 9 kabupaten/kota.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian IKK tersebut sampai dengan triwulan ini adalah monitoring tindak lanjut penilaian SPIP Terintegrasi pada sembilan kabupaten/kota.

6.5. Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3

IKK “Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3” mencerminkan jumlah Pemda yang menerapkan pengelolaan risiko dan memenuhi karakteristik MRI \geq Level 3. IKK ini diukur dengan jumlah Pemerintah Provinsi yang mengimplementasikan pengelolaan/manajemen risiko.

MRI Provinsi Bali berada pada level 3. Dengan demikian realisasi IKK “Jumlah Pemerintah Provinsi dengan MRI \geq Level 3” sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah sebanyak satu pemerintah provinsi atau tercapai 100% dari target satu pemerintah provinsi.

6.6. Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3

IKK “Jumlah Pemda Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3” mencerminkan jumlah Pemda Kabupaten/Kota yang menerapkan pengelolaan risiko dan memenuhi karakteristik MRI \geq Level 3. IKK ini diukur dengan menjumlahkan Pemda Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan pengelolaan/manajemen risiko.

Sampai dengan triwulan II tahun 2023, realisasi IKK “Jumlah Pemda Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3” adalah sebanyak tiga kab/kota atau tercapai 75% dari target tiga

kab/kota. Ketiga pemerintah daerah dengan MRI \geq Level 3 yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Tabanan.

Rencana tindak untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain dengan:

- a. Melakukan bimbingan teknis manajemen risiko kepada pemerintah daerah dengan MRI belum mencapai level 3
- b. Melakukan asistensi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP bagi pemerintah daerah dengan MRI belum mencapai level 3

6.7. Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah

IKK “Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah” menunjukkan tingkat akuntabel (efisien dan efektif) pemda dalam pengelolaan keuangan dan kinerja dengan Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB. IKK ini diukur dengan menjumlahkan pemda yang memperoleh Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB.

Sampai dengan triwulan II tahun 2023, sebanyak tiga Pemda dengan Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB atau 30% dari target Tahun 2023 sebanyak sepuluh pemda. Pemda di wilayah Provinsi Bali yang mendapat opini WTP dan SAKIP BB adalah Provinsi Bali, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung.

Rencana tindak untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain dengan:

- a. Melaksanakan asistensi peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah pada pemerintah daerah di Provinsi Bali
- b. Menerima kegiatan konsultasi terkait peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan strategi pencapaian *ultimate outcome* pada pemerintah daerah

6.8. Jumlah Desa yang Pengelolaannya Akuntabel

IKK “Jumlah Desa yang Pengelolaannya Akuntabel” menunjukkan tingkat ketaatan pemerintah desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai ketentuan. IKK dihitung dengan menjumlahkan desa yang telah mampu menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

Seluruh desa di Provinsi Bali atau 636 desa telah menggunakan aplikasi Siskeudes versi 2.0 dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangannya dan telah melaksanakan secara *online*. Dengan demikian realisasi IKK “Jumlah Desa yang Pengelolaannya Akuntabel” sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebanyak 636 desa atau 2.544% dari target 25 desa.

6.9. Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai

IKK “Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa secara Memadai” mencerminkan sejauh mana pemerintah desa telah menerapkan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan. IKK ini diukur dengan menghitung jumlah desa yang telah menerapkan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan.

Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pengelolaan aset desa sebanyak 35 desa telah menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai. Dengan demikian, sampai dengan

triwulan II tahun 2023 IKK ini terealisasi 35 desa atau 140% dari target 25 desa. Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan sebagai berikut:

Kabupaten Buleleng		Kabupaten Tabanan	
1) Pemuteran	16) Munduk	1) Delod Peken 2) Sesandan 3) Dajan Peken 4) Peken Belayu 5) Kuku	
2) Celukanbawang	17) Gitgit		
3) Sumberkima	18) Pegadungan		
4) Unggahan	19) Sambangan		
5) Bubunan	20) Kalibukbuk		
6) Munduk bestala	21) Pamaron		
7) Gunungsari	22) Alasangker		
8) Subuk	23) Sangsit		
9) Busungbiu	24) Sekumpul		
10) Umejero	25) Bungkulan		
11) Banyuatis	26) Depeha		
12) Gobleg	27) Tamblang		
13) Bengkala	28) Mengening		
14) Tejakula	29) Julah		
15) Les	30) Madenan		

7

Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan” ditunjukkan oleh pencapaian tujuh indikator kinerja yaitu:

1. Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja;
2. Nilai SAKIP Unit Kerja;
3. Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja);
4. Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja);
5. Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja;
6. Skor IKPA Unit Kerja; dan
7. Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, dari tujuh IKK terdapat dua IKK dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

7.1. Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit kerja)

IKK “Persentase penyelesaian Rencana Tindak Pengendalian (RTP) (MRI unit kerja)” mencerminkan jumlah realisasi Rencana Tindak Pengendalian yang diselesaikan dibandingkan jumlah RTP setahun. Pengukuran IKK dilakukan menggunakan aplikasi RMIS.

Persentase penyelesaian RTP (MRI unit kerja) tahun 2023 yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan II sebesar 72,73% dari target kinerja pada tahun 2023. Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah melaksanakan 16 RTP atau 72,73% dari target sebanyak 22 RTP pada tahun 2023.

Rencana tindak untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain dengan meningkatkan koordinasi Satgas Penyelenggaraan MR Perwakilan dalam mengoptimalkan implementasi MR.

7.2. Skor Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Unit Kerja

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN (Bendahara Umum Negara) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKK “Skor IKPA Unit Kerja” bertujuan meningkatkan kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan laporan keuangan. Pengukuran IKK ini berdasarkan hasil penilaian IKPA oleh Kementerian Keuangan.

Sampai dengan triwulan II tahun 2023, realisasi IKK “Skor IKPA Unit Kerja” sebesar 94,31 dari skala 100 atau 99,27% dari target 95,00. Realisasi tersebut merupakan hasil penilaian pelaksanaan anggaran per Mei tahun 2023 oleh Kementerian Keuangan sesuai data aplikasi OM SPAN. Capaian IKPA tidak memenuhi target disebabkan:

1. ketidaksesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasi dengan deviasi di atas 5% sehingga menurunkan skor IKPA pada bobot kualitas perencanaan anggaran (deviasi Halaman III DIPA).
2. penyerapan anggaran program 01/Pengawasan Pembangunan dengan persentase baru mencapai 27,23%, sehingga menurunkan skor kualitas pelaksanaan anggaran (penyerapan anggaran).

Rencana tindak untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain dengan:

1. mengupayakan kesesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasi belanja per bulannya, pada Triwulan berikutnya.
2. meningkatkan koordinasi dengan bidang-bidang pengawasan untuk mengupayakan menyerap anggaran dengan memperhatikan rencana dan kualitas kegiatan di triwulan selanjutnya.

B. Capaian *Output* Pengawasan Triwulan II Tahun 2023

Realisasi *output* Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Bali per Triwulan II Tahun 2023 sebanyak 32 laporan (sintesa hasil pengawasan), mencapai 42,11% dari target tahun 2023 sebanyak 76 laporan, dengan ringkasan sebagaimana pada tabel 2, sebagai berikut:

Tabel 2. Ringkasan Capaian *Output* Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Bali Triwulan II Tahun 2023

No	Unit Kerja/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi s.d. Tw. II 2023	Capaian (%)
1	FAG.711 Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	2	0	0,00
2	FAG.U11 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	5	4	80,00
3	FAG.U31 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	5	5	100,00
4	FAG.028 Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	24	8	33,33
5	UAG.U21 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	7	8	114,29

No	Unit Kerja/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi s.d. Tw. II 2023	Capaian (%)
6	UAG.U22 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	7	1	14,29
7	UAG.U23 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	6	6	100,00
8	UAG.U24 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	8	0	0,00
9	UAG.U27 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah – Perencanaan	2	0,00	0,00
10	UAG.U27 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah – Pelaksanaan			
11	UAG.U27 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah – Pelaporan			
12	UAG.U27 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah – Monitoring TL			
13	UAG.U41 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	2	0	0,00
14	UAG.U52 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	4	0	0,00
15	UAG.U53 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	4	0	0,00
Jumlah		76	32	42,11

Capaian *output* pengawasan sampai dengan Triwulan II disajikan pada Lampiran 2a dan Lampiran 2b.

C. Kendala Pencapaian Target dan Rencana Tindak

Pada Triwulan II Tahun 2023, pencapaian target belum menemui kendala. Rencana tindak untuk mencapai target pada triwulan berikutnya antara lain:

1. mengoptimalkan sinergi dan kolaborasi antar bidang pengawasan untuk kegiatan yang berkaitan dan mengatur strategi pemenuhan SDM sesuai prioritas batas waktu yang ditetapkan rendal;
2. menindaklanjuti hasil bimtek penilaian zona integritas dari Inspektorat BPKP;
3. merealisasikan rencana aksi/tindak untuk pencapaian kinerja pada masing-masing IKK; dan
4. aktif melakukan koordinasi dengan rendal dan mitra kerja sehingga rencana pengawasan dapat dilaksanakan tepat waktu.

D. Anggaran dan Realisasi Keuangan

Sampai dengan Triwulan II tahun 2023, telah terealisasi anggaran sebesar Rp13.286.229.483,00 atau 53,44% dari total anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2023 (DIPA revisi ke-4) sebesar Rp24.862.622.000,00, dengan ringkasan sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Anggaran dan Realisasi Keuangan
Perwakilan BPKP Provinsi Bali Triwulan II Tahun 2023

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Tw. II 2023 (Rp)	(%)
Program 01 (Dukungan Manajemen)	21.124.520.000	12.234.230.289	57,91
Program 06 (Pengawasan Intern)	3.738.102.000	1.051.999.194	28,14
Jumlah	24.862.622.000	13.286.229.483	53,44

E. Analisis Efisiensi

Secara umum, proses kegiatan operasional BPKP telah dilaksanakan secara efisien ditinjau dari penggunaan dana dan SDM. Rerata capaian efisiensi kegiatan operasional Perwakilan BPKP Provinsi Bali s.d. Triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar 235,49% untuk penggunaan dana dan 213,38% untuk penggunaan SDM.

Analisis efisiensi dilakukan per kelompok program. Penyimpulan efisiensi adalah sebagai berikut:

- a. Efisien jika rasio efisiensi sama atau lebih besar dari 100%.
- b. Belum efisien jika rasio efisiensi kurang dari 100%.

Rincian analisis efisiensi penggunaan dana dan SDM BPKP s.d. Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Analisis Efisiensi penggunaan dana dan SDM s.d. Triwulan II Tahun 2023

Program	Capaian Input (%)		Capaian Outcome	Efisiensi (%)	
	Dana	SDM		Dana	SDM
Program 01 (Dukungan Manajemen)	28,14	60,91	83,73	297,51	137,46
Program 06 (Pengawasan Intern)	57,91	56,52	136,37	235,47	241,27
Jumlah	53,44	58,97	125,84	235,49	213,38

**TARGET, REALISASI, DAN CAPAIAN SASARAN KEGIATAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023**

No.	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Program/Kegiatan						Anggaran			SDM			
			Satuan	Target		Realisasi	Capaian (%)		Pagu 2023 (Rp)	Realisasi (Rp) s.d. Trw II	%	Target (OH) 2023	Realisasi (OH)	%	
				2023	Trw II	Trw II	2023	Trw II					s.d. Trw II		
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11	12	13	
A. Program Pengawasan Pembangunan															
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	2.168	1.200	1.171,96	54,06	97,66						
		2	Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	136.270	60.000	54.807,14	40,22	91,35						
		3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	56.684	10.000	-	-	0,00						
Rerata Capaian Saskeg 1								31,43							
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	4	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	(%) Persen	85	-	-	-	NA						
		5	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2	1	1	50,00	100,00						
Rerata Capaian Saskeg 2								50,00							
3	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	6	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	(%) Persen	80	-	-	-	NA						
Rerata Capaian Saskeg 3								-							
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	7	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	1	-	-	-	NA						
		8	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	9	9	9	100	100,00						
		9	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1	1	1	100	100,00						
		10	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	59	-	-	-	NA						
		11	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	20	-	-	-	NA						
Rerata Capaian Saskeg 4								100,00							

No.	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Kinerja Program/Kegiatan					Anggaran			SDM			
				Satuan	Target		Realisasi	Capaian (%)		Pagu 2023 (Rp)	Realisasi (Rp) s.d. Trw II	%	Target (OH) 2023	Realisasi (OH)	%
					2023	Trw II	Trw II	2023	Trw II					s.d. Trw II	
1	2	3		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	12	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	(%) Persen	100	-	-	-	NA						
		13	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	(%) Persen	85	-	-	-	NA						
		14	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	3	-	-	-	NA						
		15	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Badan Usaha	2	-	-	-	NA						
Rerata Capaian Saskeg 5								-							
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	16	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Provinsi	1	1	1	100,00	100,00						
		17	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Kabupaten/Kota	8	7	7	87,50	100,00						
		18	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP >= Level 3	Provinsi	1	1	1	100,00	100,00						
		19	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP >= Level 3	Kabupaten/Kota	9	9	9	100,00	100,00						
		20	Jumlah Provinsi dengan MRI >= Level 3	Provinsi	1	1	1	100,00	100,00						
		21	Jumlah Kab/Kota dengan MRI >= Level 3	Kabupaten/Kota	4	3	3	75,00	100,00						
		22	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	10	3	3	30,00	100,00						
		23	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25	25	636	2.544,00	2.544,00						
		24	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25	25	35	140,00	140,00						
		25	Jumlah BUMD dengan MRI >= Level 3	BUMD	2	-	-	-	NA						
		26	Jumlah BLU/D dengan MRI >= Level 3	BLU/D	10	-	-	-	NA						
		27	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI >= Level 3	BUMD	1	-	-	-	NA						
28	Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI >= Level 3	BLU/D	3	-	-	-	NA								
Rerata Capaian Saskeg 6								364,06							
Capaian Rerata Saskeg Pengawasan								136,37	3.738.102.000	1.051.999.194	28,14	12.308	7.497	60,91	
B	Program Dukungan Manajemen														
7	Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan	1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75	-	-	-	NA						
		2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82	-	-	-	NA						
		3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP)	(%) Persen	70	-	-	-	NA						
		4	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	(%) Persen	100	72,73	72,73	72,73	100,00						
		5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala	75	-	-	-	NA						
		6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala	95	95,00	94,31	99,27	99,27						
		7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala	80	-	-	-	NA						
Rerata Capaian Saskeg 7								86,00	21.124.520.000	12.234.230.289	57,91	9.722	5.495	56,52	
Total								126,30	24.862.622.000	13.286.229.483	53,44	22.030	12.992	58,97	

**TARGET, REALISASI, DAN CAPAIAN INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN (IOK)
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
TRIWULAN II TAHUN 2023**

Sasaran Kegiatan/Program			Rincian Output (RO)				Kinerja RO			Anggaran			SDM		Efisiensi Dana	Efisiensi SDM
							Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15		
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPiP	1	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	Laporan	24	8	33,33	1.062.754.000	323.287.748	30,42	2.668	1.962	73,54	Efisien	Blm Efisien
			2	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	Laporan	5	4	80,00	201.720.000	130.842.524	64,86	1.581	1.206	76,28	Efisien	Efisien
			3	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	Laporan	7	8	114,29	333.339.000	164.576.610	49,37	901	757	84,02	Efisien	Efisien
			4	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	Laporan	6	6	100,00	285.120.000	100.247.000	35,16	873	933	106,87	Efisien	Blm Efisien
			Sub Jumlah Saskeg 1				42	26	61,90	1.882.933.000	718.953.882	38,18	6.023	4.858	80,66	Efisien
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional		5	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	Laporan	7	1	14,29	169.833.000	92.505.020	54,47	1.042	668	64,11	Blm Efisien	Blm Efisien
			6	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	Laporan	8	0	0,00	106.920.000	-	0,00	0	0	0,00	Efisien	Efisien
			7	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah	Laporan	2	0	0,00	122.400.000	18.002.000	14,71	132	51	38,64	Blm Efisien	Blm Efisien
			Sub Jumlah Saskeg 2				17	1	5,88	399.153.000	110.507.020	27,69	1.174	719	61,24	Blm Efisien
3	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP		8	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	Laporan	2	0	0,00	150.000.000	22.860.000	15,24	54	99	183,33	Blm Efisien	Blm Efisien
			Sub Jumlah Saskeg 3				2	0	0,00	150.000.000	22.860.000	15,24	54	99	183,33	Blm Efisien
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha		9	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	Laporan	5	5	100,00	108.504.000	67.670.000	62,37	939	1.127	120,02	Efisien	Blm Efisien
			Sub Jumlah Saskeg 4				5	5	100,00	108.504.000	67.670.000	62,37	939	1.127	120,02	Efisien
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi		10	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan		2	0	0,00	35.640.000	25.181.000	70,65	1.176	277	23,55	Blm Efisien	Blm Efisien
			Sub Jumlah Saskeg 5				2	0	0,00	35.640.000	25.181.000	70,65	1.176	277	23,55	Blm Efisien
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU		11	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Laporan	4	0	0,00	1.054.952.000	91.027.584	8,63	2.816	407	14,45	Blm Efisien	Blm Efisien
			12	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	Laporan	4	0	0,00	106.920.000	15.799.708	14,78	126	10	7,94	Blm Efisien	Blm Efisien
			Sub Jumlah Saskeg 6				8	0	0,00	1.161.872.000	106.827.292	9,19	2.942	417	14,17	Blm Efisien
Pengawasan Intern						76	32	42,11	3.738.102.000	1.051.999.194	28,14	12.308	7.497	60,91	Efisien	Blm Efisien

Sasaran Kegiatan/Program			Rincian Output (RO)		Kinerja RO				Anggaran			SDM			Efisiensi Dana	Efisiensi SDM
					Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%		
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15		
7	Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan	Pelaksanaan Dukungan Manajemen BPKP	13	Layanan Umum	layanan	1	1	100,00	627.680.000	313.827.624	50,00					
			14	Layanan Perkantoran	layanan	1	1	100,00	19.237.840.000	11.845.402.665	61,57					
			15	Layanan Sarana Internal	unit	14	12	85,71	79.000.000	75.000.000	94,94					
			16	Layanan Prasarana Internal	unit	8	0	0,00	1.180.000.000	-	0,00					
Dukungan Pengawasan			<i>Sub Jumlah Saskeg 7</i>			24	14	58,33	21.124.520.000	12.234.230.289	57,91	9.722	5.495	56,52	Efisien	Efisien
Total						100	46	46,00	24.862.622.000	13.286.229.483	53,44	22.030	12.992	58,97	Blm Efisien	Blm Efisien